

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**REKONTRUKSI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIAL BERLANDASKAN *SYARIAH ENTERPRISE THEORY*
(Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:

TRIANDINA WULANDARI
NIM : 2012310773

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Triandina Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 08 Agustus 1993
NIM : 2012310773
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Rekonstruksi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
Berlandaskan *Syariah Enterprise Theory* (Studi
Kasus pada PT. Bank BNI Syariah)

Disetujui dan diterima baik oleh:

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 3 MARET 2016



(Dr. Luciana Spica Almilia, SE.,M.Si)

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 01 MARET 2016



(Dr. Nanang Shonhadji S.E.,Ak.,M.Si., CA)

**REKONTRUKSI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIAL BERLANDASKAN SYARIAH *ENTERPRISE THEORY*
(Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah)**

Triandina Wulandari

STIE Perbanas Surabaya

Email : triandinawulandari@gmail.com

Nanang Shonhadji

STIE Perbanas Surabaya

Email : nanang@perbanas.ac.id

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility is a manifestation of social investment of Islamic banking as a form of application of the principle of trust that is both humanist and transcendent which is expected to make a financial institution of Islamic banking is becoming closer to the people. Therefore, Islamic banking should show an accountability report that is humane towards society and the Sharia Enterprise Theory as a form of social reporting standards of Islamic banking. The purpose of this study was to determine how the reconstruction of social responsibility disclosure based on Sharia Enterprise Theory. This study used a qualitative approach using PT. Bank BNI Syariah as an objects. The data analysis technique is descriptive analysis method. The data that used in this study are primary data and secondary data. The results showed that BNI Syariah in expressing the Corporate Social Responsibility is still not in accordance with the Syariah Enterprise Theory. There are still items that have not been disclosed by the BNI Syariah associated with horizontal accountability like employees, customers, society and nature. Although the relevant disclosure of vertical accountability in accordance with Shariah Enterprise Theory has been expressed by BNI Syariah.

Keywords : *corporate social responsibility disclosure, syariah enterprise theory*

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998, perbankan adalah lembaga keuangan yang paling terkena dampaknya. Dalam penelitian Dennis Harsono (2003), dijelaskan bahwa sebanyak

16 bank yang dianggap termasuk dalam golongan “kurang sehat” dilikuidasi dengan harapan dapat membantu mengatasi krisis moneter dan mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sejak saat itu masyarakat mulai menarik dana milik

mereka. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa pemerintah memperluas lingkup perbankan dan juga memperluas bank syariah. Hal ini ternyata disambut baik oleh praktisi perbankan yang dibuktikan dengan adanya bank-bank yang memberikan pelatihan mengenai perbankan syariah dan dengan mulai adanya bank-bank konvensional yang membuka cabang-cabang syariah.

Ada unsur moral yang harus diterapkan dalam pelaksanaan setiap transaksi dalam perbankan syariah. Prinsip itu adalah prinsip amanah. Amanah adalah sebuah prinsip yang bersifat *humanis-transenden*. Penerapan prinsip amanah yang bersifat *humanis* dan *transenden* dalam perbankan syariah diharapkan dapat menjadikan lembaga keuangan ini lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bertujuan untuk mencapai target dan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, perbankan syariah harus menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersifat humanis terhadap masyarakat. Laporan pertanggungjawaban harus disajikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan informasi para nasabah sebagai pemilik dana agar nasabah mengetahui bagaimana perbankan syariah mengelola dana nasabah yang ada di bank syariah tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip amanah yang diterapkan bank syariah atau tidak. Lebih penting lagi, laporan keuangan bank syariah harus disajikan sesuai dengan akuntansi keuangan yang diterima umum, dan telah menerapkan teori-teori yang

digunakan sebagai prinsip oleh suatu lembaga perbankan syariah agar informasi yang disajikan menjadi lebih bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau tambahan informasi oleh masyarakat luas.

Teori Akuntansi syariah memberikan petunjuk bagi penggunaanya konsep *Syariah Enterprise Theory* yang dikembangkan berdasarkan metafora zakat dimana perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit, tetapi berorientasi pada zakat. Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk melakukan pembayaran zakat secara optimal sehingga laba bersih bukan lagi menjadi ukuran kinerja perusahaan, tetapi zakat, alam, dan *stakeholders*. *Syariah Enterprise Theory* mengungkapkan hal-hal yang harus diketahui oleh *stakeholders* (Tuhan, manusia, dan alam).

Penelitian sebelumnya terkait dengan laporan pertanggungjawaban antara lain, Yasmin, Falikhatun dan Salamah (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban islami (*Islamic Social Responsibility Disclosure*). Luhur Prasetyo (2014) menganalisis kontribusi pembangunan ekonomi bank syariah di Indonesia, kontribusi kepada masyarakat bank syariah di Indonesia serta kontribusi untuk stakeholder bank syariah di Indonesia. Md. Kayssar Ahmed (2012) meneliti tentang bagaimana bank komersial swasta mempraktekkan *Corporate Social Responsibility* di Bangladesh.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

bagaimana rekonstruksi akuntansi pertanggungjawaban sosial berlandaskan *Syariah Enterprise Theory*. BNI Syariah dipilih sebagai sampel penelitian ini karena BNI Syariah memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, BNI Syariah berkomitmen untuk mengedepankan kinerja dan pencapaian yang tidak hanya diukur melalui profit semata. Oleh karena itu, program CSR menjadi bentuk perwujudan investasi sosial BNI Syariah kepada masyarakat. Melalui implementasi program CSR yang berkelanjutan dan terarah, BNI Syariah berharap agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR/Corporate Social Responsibility)

Tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu tindakan yang bermula dari pertimbangan etis perusahaan yang kemudian diharapkan untuk dapat meningkatkan ekonomi serta diikuti dengan peningkatan kualitas hidup karyawan serta keluarganya, sekaligus peningkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara luar (Nor, 2011:48).

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Akuntansi CSR) didefinisikan oleh Andreas (2011:11) sebagai:

Suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi stakeholder perusahaan.

Proprietary Theory

Teori ini memusatkan perhatian kepada kepentingan pemilik sehingga semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik yang kemudian direfleksikan dalam proses sistem akuntansi dan penyiapan laporan keuangan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pemilik. Karena itu, dalam teori ini pemilik dianggap sebagai tumpuan utama semua aktivitas dan memiliki seluruh harta dan juga kewajiban perusahaan. Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} - \text{Hutang} = \text{Modal}$$

Entity Theory

Teori entitas disebut juga kesatuan usaha. Munculnya *Entity Theory* bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari *Proprietary Theory*. Dalam teori ini perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dimana pemisahannya terjadi dalam kepentingan pemilik dan para pemegang ekuitas. Persamaan akuntansi teori ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Hutang} + \text{Modal}$$

Residual Equity Theory

Teori ekuitas residual menurut beberapa referensi adalah pandangan yang terletak antara *Proprietary Theory* dan *Entity Theory* yang memiliki persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} - \text{Ekuitas Khusus} = \text{Ekuitas Residual}$$

Ekuitas khusus adalah semua kewajiban entitas kepada kreditur dan ekuitas pemegang saham preferen. Apabila entitas mengalami rugi yang sangat besar hingga menyebabkan terjadinya kebangkrutan, ekuitas pemegang saham biasa menjadi hilang dan pemegang saham preferen atau pemegang obligasi menjadi pemegang ekuitas residual.

Enterprise Theory

Teori *Enterprise* ini bisa dipandang sebagai teori akuntansi sosial yang memperlihatkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak tergantung pada satu pihak. Karena itu, *Proprietary Theory* dan *Entity Theory* yang menggambarkan bahwa peran pemilik perusahaan sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan tidak bisa dijadikan dasar dalam membuat prinsip dan teknik akuntansi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders*.

Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan dan *stakeholders*.

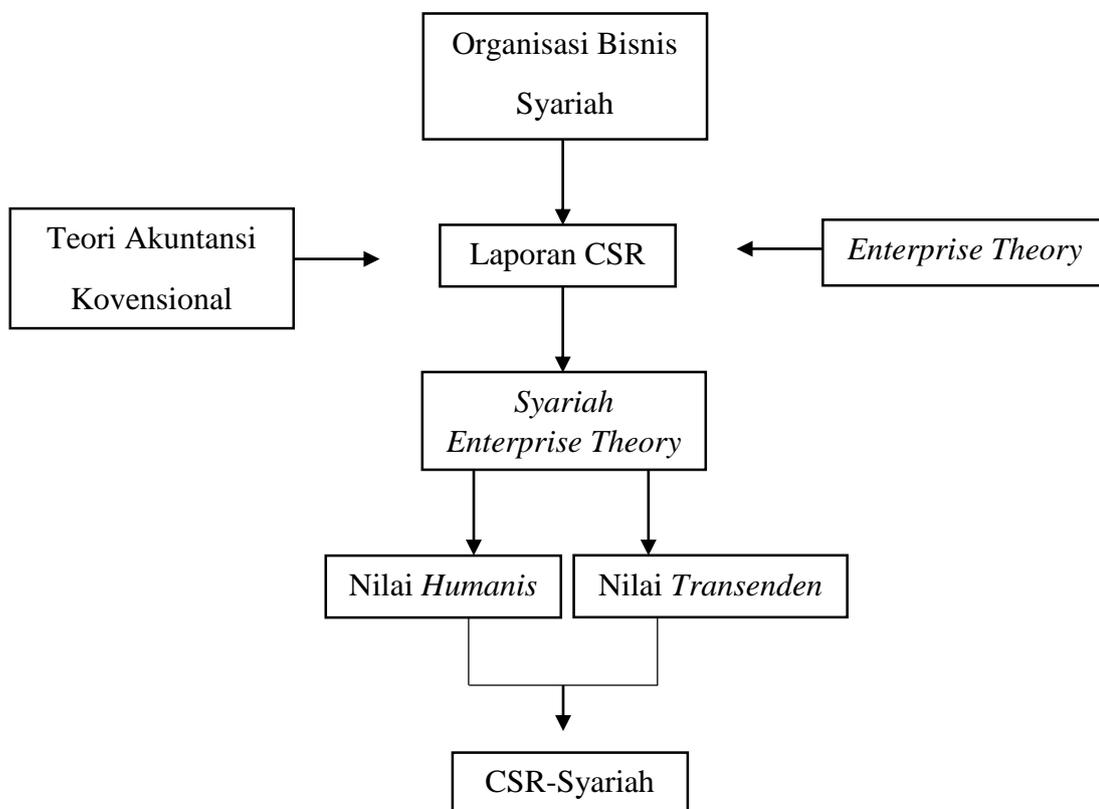
Teori ini merupakan pengembangan dari *Enterprise Theory* yang telah dimasukkan nilai-nilai Islah agar dapat menghasilkan teori yang bersifat humanis dan transendental. Menurut Iwan (2012:354) konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholder*. Oleh karena itu *enterprise theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.

Syariah Enterprise Theory memberi bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal yaitu pihak paling tinggi dan merupakan tujuan utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawabannya secara horizontal yaitu kepada manusia, lingkungan dan alam dimana manusia adalah khalifah yang telah diberi amanah untuk mengatur dengan baik semua suberdaya yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, dan lain sebagainya secara adil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada sesama manusia, konsep *Syariah Enterprise Theory* ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan.

Teori Ilmu Sosial Profetik

Ilmu sosial profetik adalah ilmu yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Nabi) dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menjembatani antara perintah normatif dengan praktik sehingga perintah-perintah normatif akan menjadi lebih operasional dan dapat dipraktikkan

dalam dunia nyata. Akuntansi syariah merupakan bagian dari upaya membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi. Perintah normatif telah ada dalam Al-Qur'an, selanjutnya menerjemahkan Al-Qur'an dalam bentuk teori Akuntansi Syariah yang dapat digunakan untuk memberikan arah mengenai praktik akuntansi yang sesuai dengan syariah. (Iwan, 2006:319)



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami subjek penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas sosial, kepercayaan,

persepsi, pemikiran individu serta kelompok. Berdasarkan judul yang diangkat sebagai permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis metode

penelitian yang menggambarkan dan menguraikan sifat atau karakteristik objek penelitian secara aktual dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini mengumpulkan data-data dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk wawancara secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pertanyaan dalam suatu penelitian berkenaan dengan kata “Bagaimana” dan “Mengapa” (Yin, 2009:1). Sedangkan berdasarkan sumber perolehan data, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data sekunder adalah data yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumusan masalah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah akuntansi pertanggungjawaban sosial berlandaskan teori syariah yaitu *Syariah Enterprise Theory* di Organisasi Bisnis Syariah yaitu Bank Syariah yang digunakan untuk mengetahui bentuk laporan dan pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial di bank syariah.

Keterkaitan Data dengan Proposisi

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara serta referensi yang berasal dari penelitian terdahulu dan artikel akan dapat diketahui bagaimana *Syariah Enterprise*

kepada responden maupun informan yang selanjutnya data-data tersebut dianalisis dan dicoba untuk memberikan pemecahan masalahnya sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu di masa depan.

Theory diterapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial bank syariah. Serta dapat memperoleh informasi mengenai kontribusi bank syariah terhadap kegiatan sosial yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial dengan berlandaskan *Syariah Enterprise Theory* sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemilik dan *stakeholders* tentang penggunaan dana dalam hal sosial

Data dan Pengumpulan Data

Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer ini dapat diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada sumber informasi yang dianggap paham mengenai kegiatan pertanggungjawaban sosial seperti bagian koordinator pelaksanaan program pertanggungjawaban sosial

2. Data Sekunder

Data sekunder biasanya adalah data yang berbentuk bukti dan laporan dan diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan adalah laporan pertanggungjawaban sosial yang telah dipublikasikan.

Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi
Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang bisa diperoleh dari jurnal, artikel, kuesioner serta penelitian terdahulu untuk mendukung melakukan analisa dalam penelitian ini
2. Wawancara
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada sumber informasi yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban sosial serta konsep-konsep dan prinsip yang dipahami dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan analisis diawali dengan melakukan dokumentasi mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban sosial. Sumber informasi yang didapat dari dokumentasi tersebut berasal dari laporan pertanggungjawaban sosial perbankan syariah maupun buku mengenai pelaporan pertanggungjawaban sosial bank syariah.
- b. Tahapan selanjutnya dalam analisis dengan melakukan wawancara/*interview* terhadap bagian umum dan SDM yang memahami masalah

tanggungjawab sosial pada BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban sosial

- c. Setelah melakukan wawancara, selanjutnya membandingkan teori yang ada yaitu *Syariah Enterprise Theory* dengan teori yang diterapkan oleh BNI Syariah
- d. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada BNI Syariah

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan *Corporate Social Responsibility* Terkait Visi dan Misi

Corporate Social Responsibility dapat dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap para *stakeholders* dan merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Oleh karena itu, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, BNI Syariah berkomitmen untuk mengedepankan kinerja dan pencapaian yang tidak hanya diukur melalui profit, sehingga BNI Syariah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk perwujudan investasi sosial terhadap masyarakat.

Menurut Informan, kegiatan *Corporate Social Responsibility* BNI Syariah dilakukan sebagai bentuk implementasi nyata dari misi BNI Syariah sehingga visi dapat tercapai, karena visi dan misi perusahaan merupakan tujuan perusahaan dan bagaimana tindakan perusahaan

untuk mencapai tujuan tersebut. Program *Corporate Social Responsibility* ini diarahkan untuk memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. BNI Syariah akan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan dan akan selalu diupayakan untuk melibatkan nasabah/calon nasabah dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jaringan kantor cabang BNI Syariah karena program ini merupakan komitmen perusahaan untuk berbagi serta memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar BNI Syariah.

Keadilan dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh BNI Syariah masih bersifat terpusat, karena dana CSR tersebut diatur oleh pusat. Hal tersebut dapat memunculkan suatu pemikiran bahwa dana yang disalurkan melalui kegiatan CSR tidak merata sehingga menimbulkan ketidakadilan. Padahal, salah satu falsafah beroperasinya suatu bank syariah adalah keadilan. Tetapi, untuk kantor cabang yang melaksanakan kegiatan CSR dengan mengumpulkan dana dari para karyawannya kemudian disalurkan melalui kegiatan yang dinamakan dompet dhuafa dan amanah day, dapat mengurangi kemungkinan munculnya pemikiran ketidakadilan disebabkan penyaluran dana CSR yang tidak merata. Selain itu,

keadilan tersebut dapat terwujud dalam pengungkapan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang sesuai dengan falsafah syariah karena BNI Syariah mengungkapkan alasan mengapa dana *Corporate Social Responsibility* tersebut disalurkan pada daerah-daerah yang telah dipilih oleh Kantor Pusat tersebut.

Laporan Tahunan BNI Syariah 2014 menjelaskan bahwa dalam rangka merealisasikan program tanggung jawab sosial, anggaran tanggung jawab sosial yang diperoleh BNI Syariah tersebut dilimpahkan kepada Yayasan Hasanah Titik untuk disalurkan dalam kegiatan-kegiatan sosial, di mana Yayasan Hasanah Titik ini dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa. Kerja sama ini diatur dalam nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor: 201/LAZDD.DIR-LEGAL/III/2014.

Sumber Dana dan Penyaluran Dana *Corporate Social Responsibility*

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* BNI Syariah berdasarkan penjelasan dalam Laporan Tahunan 2014 memiliki anggaran yang berasal dari dana zakat dan non-zakat atau disebut juga dana kebajikan yang nantinya kedua dana tersebut akan disalurkan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* melalui Yayasan Hasanah Titik.

Tabel 1.
Laporan Sumber Dana Zakat dan Kebajikan Bni Syariah Tahun 2012-2014 dan Penyalurannya

| No | Sumber Dana | Jumlah (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | | |
|---|----------------------------|---|--------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sumber Dana Zakat | | | | |
| 1 | Zakat dari Bank | 3,169 | 4,538 | 5,524 |
| 2 | Zakat dari pihak luar bank | 2,306 | 5,108 | 6,355 |
| Jumlah | | 5,475 | 9,646 | 11,879 |
| Sumber Dana Kebajikan | | | | |
| 1 | Pendapatan non-halal | 254 | 121 | 1 |
| 2 | Infaq dan Shadaqah | 79 | 121 | 163 |
| 3 | Denda | 64 | 240 | 310 |
| Jumlah | | 397 | 482 | 474 |
| Dana yang disalurkan Melalui Yayasan Hasanah Titik | | | | |
| 1 | Dana Zakat | 4,538 | 7,704 | 10,893 |
| 2 | Dana Kebajikan | 319 | 132 | 899 |
| Jumlah | | 4,857 | 7,836 | 11,792 |

Sumber: Laporan Keuangan 2014 BNI Syariah

**Rekonstruksi Akuntansi
Pertanggung-jawaban Sosial
dengan Syariah Enterprise Theory**

Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT
Salah satu upaya bank syariah dalam memenuhi prinsip *Syariah Enterprise Theory* yaitu akuntabilitas terhadap Allah dapat dilihat melalui adanya Dewan Pengawas Syariah. (DPS). Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, setiap produk dan kegiatan operasional bank dapat diketahui apakah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Hal ini dikarenakan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan nantinya akan mengeluarkan Laporan Dewan Pengawas Syariah yang memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan opini DPS. Tetapi, adanya opini DPS dalam

laporan tahunan BNI Syariah masih belum dapat dikatakan bahwa BNI Syariah telah memenuhi akuntabilitas vertikal yaitu kepada Allah SWT dikarenakan masih kurangnya penjelasan mengenai penggunaan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi oleh BNI Syariah beserta alasannya.

Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders

Akuntabilitas Horizontal terhadap Nasabah

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap nasabah, BNI Syariah memberikan perhatian yang cukup besar, salah satunya adalah meningkatkan mutu layanan kepada nasabah secara berkelanjutan karena menurut BNI Syariah, layanan yang baik dan tulus bukan hanya akan sangat menunjang kinerja bisnis tetapi lebih dari itu, dari sisi syariah hal tersebut merupakan amal perbuatan yang terpuji dan

sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, selain fokus pencapaian, BNI Syariah juga senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan pada nasabah.

Menurut *Syariah Enterprise Theory*, selain mengungkapkan opini DPS, untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kualifikasi anggota DPS, bank syariah juga harus mengungkapkan latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota DPS. Bank Syariah juga harus mengungkapkan rangkap jabatan anggota DPS untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kualifikasi anggota DPS. Hal lainnya yang harus diungkapkan oleh bank syariah dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kualifikasi anggota DPS bank syariah adalah remunerasi anggota DPS, seperti yang telah diungkapkan oleh BNI Syariah dalam Laporan Tahunan 2014

Seperti yang telah dilakukan oleh BNI Syariah, dalam Laporan Tahunan 2014, BNI Syariah telah mengungkapkan bahwa ada pendapatan yang diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah beserta jumlah dan alasan adanya transaksi tersebut. Adapun pendapatan yang diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai ketentuan syariah yaitu denda keterlambatan pembayaran angsuran atau denda lain yang berasal dari transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga, pendapatan yang berasal dari giro yang diterima pihak Bank dari penempatan pada bank konvensional, pendapatan yang berasal dari komisi, *fee*, atau

pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen, dan pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo. Alasan BNI Syariah masih melakukan transaksi tersebut adalah untuk mendisiplinkan nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran secara sengaja. Dana yang berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah tersebut akan dijadikan sebagai dana sosial atau disebut dana kebajikan.

Hal lain yang harus diungkapkan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap nasabah adalah informasi mengenai produk dan konsep syariah yang mendasari produk tersebut. Pengungkapan mengenai produk dan konsep syariah yang mendasarinya secara lengkap telah diungkapkan oleh BNI Syariah dalam Profil Perusahaan pada bagian Kegiatan Usaha dan Produk.

Kegiatan tanggung jawab sosial BNI Syariah dilaporkan dalam Laporan Tahunan dengan judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sumber dana sosial atau disebut juga sumber dana CSR BNI Syariah terdiri atas dana zakat dan non-zakat atau disebut juga dana kebajikan. Dana kebajikan berasal dari pendapatan operasional non-halal dan denda yang diperoleh perusahaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta infaq dan sedekah. Sesuai dengan Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 dan menurut *Syariah Enterprise Theory*, BNI Syariah wajib mengungkapkan pendapatan dana kebajikan dan penggunaannya.

Item-item yang menurut *Syariah Enterprise Theory* harusnya diungkapkan terkait akuntabilitas terhadap nasabah tetapi tidak diungkapkan oleh BNI Syariah adalah persentase pembiayaan PLS (*Profit Loss Sharing*) dibandingkan pembiayaan lain, kebijakan atau upaya untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang serta alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS. Item yang diungkapkan berkaitan dengan PLS oleh BNI Syariah adalah jumlah pembiayaan dengan skema PLS. Seharusnya, sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory*, hal-hal tersebut harus diungkapkan agar melengkapi akuntabilitas secara horizontal kepada nasabah.

Akuntabilitas Horizontal terhadap Karyawan

Menurut *Syariah Enterprise Theory*, ada beberapa item yang wajib diungkapkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada karyawan yang termasuk sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* BNI Syariah terhadap karyawannya, diantaranya yaitu telah mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan karyawan terkait dengan kebijakan upah dan remunerasi, banyaknya pelatihan dan jenis pelatihan yang telah diikuti serta jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut dalam laporan tahunan pada bab tanggung jawab sosial perusahaan dan bab sumber daya manusia. Selain itu, hal lain yang telah diungkapkan berkaitan dengan karyawan antara lain mengenai kesejahteraan karyawan, penghargaan masa bakti karyawan dan penghargaan Bank BNI Syariah, tingkat perputaran karyawan,

pengelolaan SDM berbasis informasi, internalisasi budaya perusahaan serta rencana pengembangan SDM di 2015. Semua program yang dilaksanakan BNI Syariah yang berkaitan dengan karyawan merupakan upaya untuk mengimplementasikan salah satu misi BNI Syariah yaitu menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah yaitu dengan dilaksanakannya seluruh kegiatan SDM yang pada akhirnya mendorong terwujudnya visi kerja unggul.

Akuntabilitas Horizontal terhadap Indirect Stakeholders

Akuntabilitas terhadap *indirect stakeholders* menurut *Syariah Enterprise Theory* ini diajukan kepada komunitas. Salah satu bentuk akuntabilitas terhadap komunitas adalah melakukan suatu upaya atau inisiatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam. BNI Syariah dalam hal ini melakukan kegiatan pameran/expo, *support marketing collateral* cabang, dan ikut serta dalam kegiatan iB Vaganza yang diselenggarakan di beberapa kota. Selain itu, BNI Syariah selalu berusaha melibatkan nasabah/calon nasabah dalam setiap kegiatan termasuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh seluruh jaringan kantor cabang BNI Syariah. BNI Syariah juga hadir lebih dekat melalui BNI Syariah Layanan Gerak yang senantiasa siap melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat.

Bentuk akuntabilitas terhadap *indirect stakeholder* lainnya adalah adanya kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM. BNI Syariah memiliki Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) namun item tersebut tidak diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu, pemberdayaan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Syariah yang juga termasuk sebagai akuntabilitas terhadap *indirect stakeholders* dapat terlihat pada pengungkapan dalam laporan tahunannya yang menyatakan bahwa UMKM merupakan sektor penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Akuntabilitas Horizontal terhadap Alam

Beberapa item yang harus diungkapkan menurut *Syariah Enterprise Theory* berkaitan dengan akuntabilitas horizontal terhadap alam adalah mengenai pembiayaan, yaitu kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara. Selain itu, item yang harus diungkapkan mengenai pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan beserta jumlah pembiayaan yang diberikan berikut alasan dilakukannya pembiayaan tersebut. Namun, dalam laporan tahunan BNI Syariah 2014, hal ini tidak diungkapkan.

Sebagai bentuk perhatian yang besar dalam bidang lingkungan, BNI Syariah melaksanakan program “Hijaukan Bumi Selamatkan

Generasi” yaitu suatu kegiatan membagikan sejumlah tanaman kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bumi. Gerakan bagi-bagi tanaman menyambut Hari Bumi merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) BNI Syariah. Program CSR dalam rangka Hari Bumi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh cabang BNI Syariah. Selain kegiatan bagi-bagi tanaman, sebagai bentuk kepedulian lain terhadap bumi, BNI Syariah juga melaksanakan suatu program dalam lingkungan internalnya dimana seluruh karyawan BNI Syariah di seluruh Indonesia diwajibkan naik transportasi umum atau transportasi bebas polusi, seperti sepeda dan sejenisnya.

Kegiatan “Hijaukan Bumi Selamatkan Generasi” ini juga dilaksanakan di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa walaupun kegiatan yang dilakukan sedikit berbeda dengan kegiatan yang dilakukan di pusat. Kegiatan yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa meliputi kegiatan tanam pohon serta seluruh karyawan diwajibkan naik transportasi umum seperti yang terlihat dalam lampiran dan tidak melaksanakan kegiatan bagi-bagi tanaman.

Menurut *Syariah Enterprise Theory*, alam termasuk salah satu *stakeholders* yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Tetapi, dalam laporan tahunan 2014 BNI Syariah tidak banyak diungkapkan mengenai perhatian terhadap alam. Tidak ada program BNI Syariah yang termasuk dalam upaya melestarikan atau memperbaiki kondisi alam agar

menjadi tempat yang lebih baik bagi generasi yang akan datang seperti yang program Hijaukan Bumi Selamatkan Generasi yang telah dilakukan pada tahun 2013.

Pembahasan

Sebagai bank yang berpredikat syariah, BNI Syariah harus memperhatikan segala kegiatan operasionalnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* serta pengungkapannya. Menurut konsep *Syariah Enterprise Theory* ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengungkapan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Bank Syariah.

Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu bentuk tanggung jawab BNI Syariah terhadap Allah SWT atau disebut juga akuntabilitas secara vertikal dalam kegiatan tanggung jawab sosial BNI Syariah adalah adanya pengungkapan opini Dewan Pengawas Syariah serta apakah BNI Syariah telah menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya. Dalam laporan tahunan BNI Syariah pada tahun 2014 telah mengungkapkan adanya opini Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Pengawas Syariah serta penjelasan bahwa seluruh kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Walaupun laporan Dewan Pengawas Syariah yang diungkapkan masih bersifat umum, belum ada penjelasan khusus mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan, tetapi BNI Syariah sudah dapat dikatakan memenuhi akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT.

Selain akuntabilitas vertikal, selanjutnya adalah akuntabilitas horizontal terhadap *Direct Stakeholders* (Nasabah dan Karyawan) serta *Indirect Stakeholders* (Masyarakat luas dan alam). Sebagai bentuk akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* ada beberapa hal yang harus dilakukan dan diungkapkan oleh BNI Syariah. BNI Syariah telah mengungkapkan kualifikasi dan pengalaman anggota DPS, kegiatan yang dilakukan dan remunerasi bagi anggota DPS. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kualifikasi anggota DPS BNI Syariah. Selain itu, pendapatan yang tidak sesuai syariah, jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah serta laporan dana zakat dan dana kebajikan serta sumber dan penggunaan dana tersebut juga telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BNI Syariah 2014. BNI Syariah dapat dikatakan telah memenuhi akuntabilitas horizontal terhadap nasabah walaupun ada beberapa hal yang belum diungkapkan BNI Syariah seperti kebijakan ataupun usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang, dan juga tidak mengungkapkan data mengenai pembiayaan yang berbasis *Profit Loss Sharing*.

Terkait akuntabilitas terhadap karyawan, BNI Syariah dalam laporan tahunannya sudah mengungkapkan bentuk tanggung jawabnya terhadap karyawan, sesuai

dengan *Syariah Enterprise Theory*. Hanya ada beberapa hal yang belum dilakukan dan diungkapkan oleh BNI Syariah seperti upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan dan ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya. Sebenarnya, layanan kesehatan untuk pegawai BNI Syariah sudah dilakukan dan diungkapkan walaupun kegiatan tersebut masih diperuntukkan hanya kepada karyawan saja, belum kepada keluarga. Selain itu, layanan konseling belum dilakukan baik untuk karyawan maupun keluarga karyawan sehingga tidak ada pengungkapan mengenai hal tersebut. Kegiatan berkaitan dengan karyawan tersebut tidak secara keseluruhan diungkapkan dalam laporan *Corporate Social Responsibility*, tetapi sebagian diungkapkan dalam bab Sumber Daya Manusia. Pengungkapan kegiatan yang telah dilakukan tersebut disertai dengan perkiraan alokasi dana pada setiap kegiatan.

BNI Syariah telah memenuhi akuntabilitas horizontal terhadap *Indirect Stakeholders*, tetapi sama seperti akuntabilitas terhadap karyawan, ada beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh BNI Syariah seperti adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan masyarakat kecil seperti tidak menggusur rakyat kecil dan tidak membodohi, serta kurang adanya transparansi BNI Syariah dalam mengungkapkan pembiayaan yang diberikan kepada sektor UMKM. Terkait dengan pembiayaan terhadap sektor UMKM, BNI Syariah hanya mengungkapkan sebatas Keunggulan sektor UMKM

sehingga pantas untuk melakukan pembiayaan dalam sektor UMKM ini serta tantangan dan strategi yang akan dilakukan oleh BNI Syariah dalam pembiayaan sektor UMKM.

Akuntabilitas horizontal BNI Syariah terhadap alam masih dianggap kurang memenuhi. Karena, masih banyak yang belum diungkapkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial BNI Syariah terhadap alam. BNI Syariah belum mengungkapkan kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energy, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara. Tidak mengungkapkan ada atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, jika ada jumlahnya juga harus diungkapkan serta alasan melakukan kegiatan tersebut. Tetapi jika tidak melakukan cukup diungkapkan bahwa BNI Syariah tidak melakukan pembiayaan kepada usaha-usaha yang dapat merusak lingkungan.

Berdasarkan analisis diatas, BNI Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory* dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Walaupun, pengungkapan dalam laporan tahunan BNI Syariah sudah mengungkapkan beberapa item yang merupakan bagian dari akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT, akuntabilitas horizontal yang terdiri dari *Direct Stakeholders* (Nasabah dan Karyawan) serta *Indirect Stakeholder* (Masyarakat dan Alam).

KESIMPULAN,

KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dan hasil analisis data yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BNI Syariah dalam melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* masih belum sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory* dikarenakan masih banyaknya item-item menurut *Syariah Enterprise Theory* yang tidak diungkapkan oleh BNI Syariah dalam bentuk akuntabilitas secara horizontal yaitu kepada karyawan, nasabah, masyarakat dan alam. Walaupun item-item yang berkaitan dengan akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT telah diungkapkan secara jelas dan lengkap oleh BNI Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian BNI Syariah terhadap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan masih perlu ditingkatkan.

Informasi mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BNI Syariah terhadap lingkungan tidak disertai dengan pengungkapan dalam bentuk rincian setiap kegiatan, hanya diungkapkan dana yang disalurkan pada setiap bidang seperti pendidikan, lingkungan, dan lain-lain, walaupun dalam setiap bidang tersebut program yang dilaksanakan tidak hanya satu program. Selain itu, penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh BNI Syariah tidak mengungkapkan penyaluran dana berdasarkan daerah-daerah kantor cabang. Hal ini dapat menimbulkan pemikiran bahwa penyaluran dana CSR BNI Syariah tidak merata dan hanya disalurkan pada daerah tertentu saja. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa ada ketidakadilan dalam

penyaluran dana CSR BNI Syariah (1) Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Sulit mencari perbankan syariah yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan CSR karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di perbankan syariah pusat yang berlokasi di Jakarta (2) Peneliti tidak bisa mengetahui pelaksanaan program CSR secara langsung karena program CSR dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik yang berlokasi di Jakarta sehingga peneliti tidak dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan BNI Syariah melalui Yayasan Hasanah Titik sejak dimulainya kerja sama antara BNI Syariah dengan Yayasan Hasanah Titik. (3) Sulit menentukan waktu wawancara dengan pihak perbankan karena informan memiliki jabatan *customer service* sehingga harus wawancara saat jam operasional berakhir, dan saat jam operasional berakhir informan masih harus melakukan rekapitulasi atas kegiatannya pada hari tersebut. (4) Wawancara atau observasi yang dilakukan kurang karena wawancara yang dilakukan lebih kepada wawancara secara tidak langsung yaitu melalui sms maupun telepon. (5) Informan adalah *customer service* yang bertindak sebagai koordinator saat pelaksanaan salah satu kegiatan CSR, bukan kepala cabang PT. Bank BNI Syariah sehingga pengetahuan mengenai CSR yang masih diatur oleh pusat sangat minim. (6) Lingkup penelitian hanya di salah satu Kantor Cabang PT. Bank BNI Syariah sehingga informasi yang diperoleh juga terbatas

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dalam penelitian

berikutnya untuk tidak hanya menggunakan data laporan satu tahun, minimal dua tahun, sehingga dapat diketahui sistem pelaporan tanggung jawab sosial setiap item-item pelaporannya dan kegiatan yang dilakukan selalu sama, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih jelas mengenai kegiatan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan data wawancara secara langsung dari pihak pengelola CSR ataupun mengikuti proses pelaksanaan CSR yang dilaksanakan agar diperoleh data yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan lebih baik dengan cara mengatur waktu wawancara dengan sebaik-baiknya. Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mewawancarai kepala cabang agar informasi yang diperoleh dapat lebih mendukung penelitian. Lingkup penelitian diperluas, tidak hanya mewawancarai satu kantor cabang PT. Bank BNI Syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, Md. Kayssar. 2012. "Corporate Social Responsibility Practices of Commercial Banks in Bangladesh: A Case Study on Southeast Bank Ltd". *Journal*
- Andreas Lako. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- BNI Syariah website, (online). (www.bnisyariah.co.id, diakss 22 November 2015)
- Dennis Harsono. 2003. "Penerapan Compliance Test untuk Meminimalisasi Terjadinya Kredit Macet pada Bank X Cabang Kertajaya, Surabaya". Tesis, Universitas Surabaya
- Iwan Triyuwono. 2006. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Luhur Prasetyo. 2014. Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah di Indonesia. *Kodifikasi*. 8. Pp 93-113
- Nor Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yasmin U.A., Falikhatun, dan Salamah W. 2012. Bank Syariah Di Indonesia: *Corporate Governance Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure)*. Unissula. 1 (December). hal. 255-267
- of Business and Management*. 12 (July-August). Pp. 13-18
- Yin, Robert. K. 2009. *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada